

PERAN PENDIDIKAN GEOGRAFI DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN: TINJAUAN LITERATUR

Mazwan^{1*}, Muis², Aprianty³, Melda Yulisa⁴, Kartika Selytias Utami⁵,
Faraisha Hizra⁶, Ulia Safitri⁷, Siti Shara⁸, Siti Shara⁹

¹Pendidikan Geografi, Universitas Al Washliyah Darussalam Banda Aceh, Indonesia

²Ilmu Administrasi Negara, Universitas Al Washliyah Darussalam Banda Aceh, Indonesia

^{3,4,5} Agribisnis, Universitas Al Washliyah Darussalam Banda Aceh, Indonesia

^{6,7,8,9} Arsitektur, Universitas Al Washliyah Darussalam Banda Aceh, Indonesia

* Corresponding Email: Mazwan043@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan salah satu agenda strategis dalam kebijakan publik di Indonesia, mengingat peran sektor pertanian dalam menjaga ketahanan pangan, keseimbangan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan geografi memiliki kontribusi penting dalam membangun pemahaman spasial, ekologis, dan kewilayahan yang dibutuhkan dalam perumusan dan implementasi kebijakan pertanian. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan geografi dalam mendukung kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan melalui pendekatan tinjauan literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review terhadap artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan pendidikan geografi, administrasi negara, dan pembangunan pertanian. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan geografi berperan dalam memperkuat kapasitas analisis spasial kebijakan pertanian, meningkatkan literasi lingkungan pembuat kebijakan dan masyarakat, serta mendukung perencanaan pertanian berbasis wilayah. Artikel ini menyimpulkan bahwa integrasi pendidikan geografi dalam kebijakan publik dapat menjadi strategi penting untuk mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berkeadilan wilayah.

Kata Kunci : pendidikan geografi, kebijakan publik, administrasi negara, pertanian berkelanjutan, pembangunan wilayah.

ABSTRACT

Sustainable agricultural development is a strategic agenda in Indonesian public policy, given the agricultural sector's role in maintaining food security, environmental balance, and public welfare. Geography education plays a crucial role in developing the spatial, ecological, and regional understanding needed for the formulation and implementation of agricultural policies. This article aims to examine the role of geography education in supporting sustainable agricultural development policies through a literature review approach. The research method used is a literature review of national and international journal articles relevant to geography education, public administration, and agricultural development. The results of the study indicate that geography education plays a role in strengthening the capacity for spatial analysis of agricultural policies, increasing the environmental literacy of policymakers and the public, and supporting regional-based agricultural planning. This article concludes that integrating geography education into public policy can be an important strategy for realizing sustainable and equitable agricultural development.

Keywords : geography education, public policy, public administration, sustainable agriculture, regional development.

PENDAHULUAN

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam kemajuan bangsa, terutama di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, karena ia bertanggung jawab atas jaminan ketersediaan pangan, penyerapan tenaga kerja, dan dukungan terhadap ekonomi daerah pedesaan. Menurut laporan World Bank pada tahun 2021, bidang ini masih menjadi tulang punggung hidup bagi mayoritas penduduk miskin di negara berkembang, serta memberikan sumbangan besar dalam mengurangi kemiskinan dan memajukan wilayah. Di Indonesia, pertanian bukan sekadar sektor ekonomi, melainkan juga fondasi sosial dan ekologi yang menjaga kelestarian sumber daya alam serta stabilitas daerah perdesaan (BPS, 2023).

Namun, perkembangan pertanian dihadapkan pada berbagai hambatan struktural dan geografis yang rumit. Konversi lahan pertanian menjadi fungsi non-pertanian, penurunan kualitas tanah, kesenjangan pembangunan antarwilayah, serta efek perubahan iklim semakin memperlambat kelangsungan sektor ini (FAO, 2020). Di samping itu, kurangnya sinergi kebijakan antarsektor dan antarwilayah sering membuat kebijakan pertanian terkesan terpisah-pisah dan kurang mampu menyesuaikan dengan ciri khas geografis daerah (OECD, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan pertanian tak bisa dipisahkan dari aspek ruang dan pengelolaan pemerintah yang efisien.

Dari sudut pandang administrasi negara, kebijakan pengembangan pertanian harus tidak hanya fokus pada peningkatan hasil produksi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Gagasan pertanian berkelanjutan menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, pelestarian sumber daya alam, dan kesejahteraan masyarakat, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang (FAO, 2017). Karena itu, penyusunan dan penerapan kebijakan pertanian butuh pendekatan multidisipliner yang dapat menggabungkan elemen ekonomi, sosial, dan lingkungan secara menyeluruh.

Pendidikan geografi memiliki fungsi krusial dalam mendukung kebijakan pertanian berkelanjutan, karena kajiannya menekankan hubungan manusia dengan lingkungan, analisis spasial, serta dinamika wilayah. Pendidikan ini melatih siswa dan para pemangku kepentingan untuk berpikir secara spasial, yang amat diperlukan dalam merencanakan wilayah pertanian, mengelola sumber daya alam, dan menetapkan kebijakan berdasarkan kondisi lokal (UNESCO, 2019). Dengan metode geografis, kebijakan pertanian bisa dibuat lebih sesuai konteks, mengikuti situasi biofisik, sosial, dan ekonomi suatu daerah.

Selain itu, pendidikan geografi turut membantu meningkatkan pemahaman kebijakan dan kesadaran lingkungan di kalangan pegawai negara serta masyarakat. Pengetahuan tentang kapasitas dukung dan tampung lingkungan, pola penggunaan ruang, serta risiko seperti banjir dan kekeringan menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan publik di bidang pertanian (Dunn, 2018). Dengan cara ini, pendidikan geografi bukan hanya disiplin ilmu, tetapi juga alat strategis untuk memperkuat pengelolaan pembangunan pertanian yang berbasis wilayah. Meski peran pendidikan geografi dalam konteks pembangunan wilayah dan lingkungan sudah sering dibicarakan, penelitian yang khusus menghubungkan pendidikan geografi dengan kebijakan pertanian berkelanjutan dari perspektif administrasi negara masih belum banyak. Oleh sebab itu, artikel ini

bermaksud menganalisis secara sistematis peran pendidikan geografi dalam mendukung kebijakan pertanian berkelanjutan melalui metode tinjauan literatur. Kajian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan teoritis dan konseptual untuk pengembangan kebijakan publik yang lebih fleksibel, lestari, dan berorientasi pada wilayah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur (literature review) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Literatur yang dikaji terdiri atas artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, serta laporan lembaga internasional yang relevan dengan topik pendidikan geografi, kebijakan publik, administrasi negara, dan pembangunan pertanian berkelanjutan. Sumber literatur diperoleh melalui basis data Google Scholar, SINTA, dan Scopus dengan kata kunci antara lain *geography education*, *agricultural policy*, *sustainable agriculture*, *public administration*, dan *regional development*. Kriteria pemilihan literatur meliputi: (1) relevansi topik, (2) publikasi dalam 10-15 tahun terakhir, dan (3) kredibilitas sumber. Data dianalisis dengan cara mengelompokkan temuan-temuan utama berdasarkan tema peran pendidikan geografi dalam kebijakan pertanian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Geografi dan Pemahaman Spasial Kebijakan Pertanian

Pendidikan geografi menitikberatkan pada penguasaan konsep ruang, daerah, dan hubungan timbal balik antara manusia dengan alam sebagai dasar untuk menelaah berbagai gejala pembangunan. Pengertian spasial memungkinkan seseorang melihat saling keterhubungan antara kondisi fisik suatu wilayah, kegiatan manusia, serta pengaruh kebijakan terhadap lingkungan dan komunitas. Di bidang kebijakan pertanian, kemampuan berpikir spasial amat krusial karena sektor ini sangat tergantung pada ciri-ciri wilayah, seperti kondisi tanah, cuaca, bentang alam, dan pasokan air. Pengertian spasial yang didapat dari pendidikan geografi berfungsi dalam menilai kecocokan lahan untuk pertanian, menyusun pola penanaman yang selaras dengan kondisi sekitar, serta mengatur sumber daya alam secara lestari. FAO (2018) menekankan bahwa rencana pertanian yang mengabaikan sifat spasial wilayah berisiko menimbulkan kerusakan lahan, penurunan hasil panen, dan gangguan lingkungan dalam jangka waktu lama. Karena itu, metode geografis penting untuk mendukung kebijakan pertanian yang fleksibel dan berkelanjutan.

Berbagai studi menunjukkan bahwa pendekatan geografis dan analisis daerah dapat meningkatkan mutu perencanaan pertanian yang berbasis wilayah. Cara ini membantu pemerintah mengenali potensi dan batasan wilayah dengan lebih tepat, sehingga kebijakan pertanian bisa disesuaikan dengan situasi setempat dan tidak seragam (Davis & DeVries, 2019). Lebih dari itu, penerapan prinsip geografi dalam kebijakan pertanian juga membantu mengurangi bahaya kerusakan lingkungan, seperti pengikisan tanah, perubahan fungsi lahan yang tak terkendali, serta perselisihan penggunaan ruang. Hartshorne (2015) menyampaikan bahwa geografi sebagai bidang ilmu memiliki tugas utama dalam menghubungkan aspek fisik dan sosial suatu daerah, termasuk dalam pembangunan pertanian. Dengan memahami keterkaitan antara ruang, manusia, dan lingkungan, kebijakan pertanian bisa dirancang lebih menyeluruh dan fokus pada kelestarian. Oleh sebab itu, pendidikan geografi bukan sekadar alat untuk mentransfer

ilmu akademis, melainkan juga landasan konseptual dalam menyusun kebijakan pertanian berbasis wilayah yang efisien dan peduli lingkungan.

2. Pendidikan Geografi dalam Perspektif Administrasi Negara

Dalam studi administrasi negara, kebijakan publik memerlukan landasan analisis yang menyeluruh agar tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan penilaiannya bisa berjalan dengan lancar. Kebijakan yang dibuat tanpa memperhitungkan situasi nyata daerah dan ciri khas sosial masyarakat berpotensi meleset sasaran dan sulit diterapkan. Karena itu, pendekatan yang berorientasi pada wilayah menjadi salah satu prinsip utama dalam administrasi publik masa kini, khususnya dalam pembangunan yang lestari. Pendidikan geografi memberikan sumbangan besar dalam membangun kemampuan pegawai negara untuk memahami variasi wilayah, baik dari segi fisik, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Melalui pendidikan ini, aparatur pemerintah dilengkapi keterampilan untuk meneliti perbedaan kondisi antarwilayah, mengidentifikasi peluang dan masalah setempat, serta memahami interaksi antara kegiatan manusia dan alam. Keterampilan ini menjadi aset penting dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih tanggap terhadap keperluan masyarakat dan kondisi wilayah yang beraneka ragam. Dunn (2018) menjelaskan bahwa kebijakan publik yang berbasis wilayah biasanya lebih fleksibel dan berkelanjutan ketimbang kebijakan yang seragam. Kebijakan seragam sering mengabaikan variasi karakteristik lokal, sehingga penerapannya tidak maksimal di berbagai daerah. Sebaliknya, kebijakan berbasis wilayah memungkinkan pemerintah menyelaraskan strategi dan program pembangunan sesuai dengan kondisi geografis dan sosial-ekologis masing-masing wilayah, termasuk di bidang pertanian.

Selanjutnya, OECD (2019) menyatakan bahwa peningkatan kemampuan aparatur negara dalam memahami aspek spasial kebijakan adalah kunci sukses pengelolaan pembangunan wilayah. Dalam konteks pertanian, pemahaman spasial membantu pegawai negara menentukan prioritas pembangunan, mengatur sumber daya alam dengan efisien, serta meminimalisir pertikaian penggunaan ruang. Dengan demikian, pendidikan geografi berfungsi sebagai dasar konseptual dalam membentuk kebijakan publik yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga adil secara sosial dan lestari secara lingkungan.

Dengan mengintegrasikan pendidikan geografi ke dalam administrasi negara, kebijakan pertanian bisa dirancang lebih sesuai konteks dan melibatkan partisipasi. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah menangani tantangan pembangunan pertanian yang kompleks, seperti kesenjangan wilayah, kerusakan lingkungan, dan perubahan iklim, melalui kebijakan yang didasarkan pada data dan pemahaman wilayah yang mendalam.

3. Peran Pendidikan Geografi dalam Mendorong Pertanian Berkelanjutan

Pertanian yang lestari mengharuskan adanya kesadaran ekologis serta penggunaan sumber daya alam dengan bijak agar keperluan pangan generasi sekarang bisa dipenuhi tanpa merugikan kemampuan generasi berikutnya. Gagasan ini menyoroti keseimbangan antara hasil pertanian, pelestarian lingkungan, dan kemakmuran sosial komunitas. FAO (2017) menyatakan bahwa kesuksesan pertanian berkelanjutan sangat tergantung pada tingkat pemahaman masyarakat dan pihak terkait mengenai hubungan antara kegiatan pertanian dan kapasitas dukung lingkungan. Dalam hal ini, pendidikan geografi memainkan peran krusial dalam menumbuhkan nilai-nilai keberlanjutan, baik bagi siswa

maupun masyarakat umum. Pendidikan geografi bukan hanya menyediakan ilmu tentang kondisi fisik wilayah, tetapi juga membangun kesadaran ekologi dan tanggung jawab sosial terhadap alam. Melalui proses belajar geografi, individu didorong untuk memahami saling keterkaitan antara penggunaan lahan, perubahan cuaca, dan kelangsungan sistem pertanian secara keseluruhan. Pembelajaran geografi menawarkan pengertian sistematis tentang konsep pelestarian lahan, penyesuaian terhadap perubahan iklim, serta pengaturan wilayah pertanian yang peduli lingkungan. UNESCO (2019) menegaskan bahwa pendidikan untuk pembangunan lestari bertujuan membentuk cara berpikir dan tindakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam bidang pertanian, pemahaman ini penting untuk mendorong praktik-praktik pertanian yang ramah lingkungan, seperti pengelolaan tanah yang lestari, pemanfaatan air dengan efisien, dan penyesuaian terhadap risiko cuaca.

Selain itu, pendidikan geografi turut membantu meningkatkan kemampuan masyarakat dan pembuat kebijakan untuk memahami dampak jangka panjang dari aktivitas pertanian terhadap lingkungan dan wilayah. IPCC (2022) menunjukkan bahwa perubahan iklim memiliki pengaruh besar terhadap produktivitas pertanian dan ketahanan pangan, sehingga dibutuhkan kebijakan dan praktik pertanian yang adaptif serta didasarkan pada pengetahuan lingkungan. Pendidikan geografi, dengan metode spasial dan ekologisnya, bisa menjadi alat penting dalam membangun kesadaran tersebut. Dengan cara ini, pendidikan geografi berkontribusi dalam memperkuat dasar pengetahuan dan nilai yang diperlukan untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan. Penggabungan nilai-nilai keberlanjutan ke dalam pendidikan geografi dapat membantu menciptakan sumber daya manusia yang mampu mendukung kebijakan pertanian yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga lestari secara lingkungan dan sosial.

4. Integrasi Pendidikan Geografi dalam Kebijakan Pembangunan Pertanian

Hasil tinjauan pustaka menunjukkan bahwa penggabungan pendidikan geografi ke dalam kebijakan pengembangan pertanian bisa diwujudkan melalui berbagai pendekatan yang saling mendukung, mulai dari perkuatan kurikulum pendidikan, peningkatan kemampuan pegawai pemerintah, hingga penyusunan kebijakan publik yang menggunakan data spasial. Penggabungan ini krusial karena tantangan pengembangan pertanian bersifat kompleks dan multidimensi, sehingga butuh pendekatan kebijakan yang didasarkan pada pengetahuan wilayah dan kondisi sosial-ekologis masyarakat. Perkuatan kurikulum pendidikan geografi menjadi langkah pertama dalam membangun dasar pemahaman spasial dan lingkungan yang kokoh. Kurikulum yang menekankan analisis daerah, kelestarian lingkungan, dan dinamika pengembangan pertanian dapat melengkapi siswa dengan kemampuan berpikir kritis terhadap masalah pertanian dan tata ruang.

Pendidikan geografi yang fokus pada isu-isu terkini, seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kerusakan lahan, berpotensi menciptakan sumber daya manusia yang mampu mendukung penyusunan kebijakan pertanian lestari di masa mendatang (UNESCO, 2019). Selain melalui pendidikan formal, penggabungan pendidikan geografi juga bisa dilakukan lewat pelatihan dan pengembangan kemampuan aparatur pemerintah. Pegawai negara yang memiliki pemahaman geografis dan spasial yang cukup akan lebih siap merancang dan menerapkan kebijakan pertanian berbasis wilayah. OECD (2019) menekankan bahwa peningkatan kemampuan aparatur pemerintah dalam memahami

aspek spasial kebijakan adalah faktor utama dalam kesuksesan pengelolaan pembangunan wilayah, termasuk di sektor pertanian. Pelatihan berbasis geografi dapat membantu aparaturnya mengidentifikasi potensi dan masalah lokal, serta menyelaraskan kebijakan dengan ciri khas wilayah yang beragam. Lebih dari itu, penyusunan kebijakan pengembangan pertanian yang menggunakan data spasial menjadi wujud nyata penggabungan pendidikan geografi dalam administrasi negara. Penggunaan data spasial, seperti peta kecocokan lahan, penggunaan lahan, dan risiko lingkungan, memungkinkan pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan adil antarwilayah. FAO (2020) menyatakan bahwa kebijakan pertanian yang didukung data spasial biasanya lebih efektif dalam mengatur sumber daya alam dan mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah. Sinergi antara pendidikan geografi dan kebijakan publik ini memainkan peran penting dalam mewujudkan pengembangan pertanian yang lestari dan adil antarwilayah. Dengan pendekatan berbasis wilayah, kebijakan pertanian tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan produksi, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas dukung lingkungan, kesejahteraan petani, dan kelestarian sumber daya alam. Penggabungan ini juga mendorong terciptanya kebijakan yang lebih fleksibel terhadap perubahan iklim dan dinamika sosial-ekonomi wilayah, sehingga mampu menjawab tantangan pengembangan pertanian dalam jangka panjang.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembacaan kembali buku dan artikel, bisa disimpulkan bahwa pelajaran geografi memiliki peran penting dalam membantu membuat kebijakan pertanian yang baik dan ramah lingkungan. Pendidikan geografi membantu memperbaiki kemampuan membayangkan letak tempat, meningkatkan pemahaman tentang lingkungan sekitar, dan mendukung pembuatan kebijakan pertanian yang sesuai dengan kondisi wilayahnya. Mengintegrasikan pendidikan geografi ke dalam administrasi negara merupakan langkah penting untuk menjamin kebijakan pertanian yang efektif, fleksibel, dan berkelanjutan. Karena itu, para pengambil kebijakan dianjurkan untuk meningkatkan penggunaan pendekatan geografi dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan pertanian. Cara mencapainya bisa dilakukan dengan memperkuat kurikulum, memberikan pelatihan kepada pegawai pemerintah, serta mempererat kerja sama antara akademisi dan pemerintah. Masa depannya, diperlukan penelitian lebih lanjut yang mempelajari penerapan nyata penggabungan pembelajaran geografi dalam kebijakan pertanian di tingkat daerah dan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Pertanian Indonesia. Jakarta: BPS.
- Davis, K., & DeVries, J. (2019). *Agricultural Extension and Rural Development*. Washington DC: World Bank Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis* (6th ed.). New York: Routledge.
- FAO. (2017). *The Future of Food and Agriculture: Trends and Challenges*. Rome: FAO.
- FAO. (2018). *Land Evaluation towards a Revised Framework*. Rome: FAO.
- FAO. (2020). *The State of Food and Agriculture*. Rome: FAO.
- Hartshorne, R. (2015). *The Nature of Geography*. London: Routledge.

- IPCC. (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Cambridge: Cambridge University Press.
- OECD. (2019). *Rural Development Policy Reviews*. Paris: OECD Publishing.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). New York: Pearson.
- UNESCO. (2019). *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*. Paris: UNESCO.
- World Bank. (2021). *Agriculture and Food Overview*. Washington DC: World Bank.